

**ABSTRACT**

*This research focuses on analyzing Indonesian policies in dealing with refugees from abroad. Departing using the theory of securitization-desecuritization carried out by the Copenhagen School, this study aims to analyze why Indonesia applies policies that are more directed towards desecuritization in handling refugees abroad. Unlike other countries that tend to securitize refugees by considering them as an existential threat. Indonesia is just the opposite whereas the issues of refugees in Indonesia during the Joko Widodo era tend to be more open than previous administration. Because it does not include the issue of refugees to the security agenda and perceived it as a security threat, therefore there is no need for Indonesia to take an emergency action in dealing with refugees from abroad. Using the field study method and literature review, this study found that there were three indicators that influenced Indonesia to implement a desecuritization policy for refugees which are; Indonesia's status as a transit country; internal factors such as social and economic aspects; and external influences that encourage Indonesia to implement a pro-refugee policy.*

*Keywords: Indonesia, Refugee, Desecuritization*

Penelitian ini fokus dalam mengkaji mengenai kebijakan Indonesia dalam menangani pengungsi dari luar negeri. Berangkat menggunakan teori sekuritisasi-desekuritisasi yang diusung kelompok *Copenhagen School*, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengapa Indonesia menerapkan kebijakan yang lebih mengarah ke desekuritisasi dalam penanganan pengungsi luar negeri. Tidak seperti negara lain yang cenderung melakukan sekuritisasi pengungsi dengan menganggap pengungsi sebagai *existential threat*. Indonesia justru sebaliknya, isu dan persoalan pengungsi di Indonesia era pemerintahan Joko Widodo cenderung lebih terbuka dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Oleh karena Indonesia tidak memasukkan isu pengungsi ke dalam agenda keamanan, dan tidak mempresepsikan pengungsi sebagai ancaman keamanan, sehingga Indonesia tidak membutuhkan adanya *emergency action* dalam merespon penanganan pengungsi luar negeri. Menggunakan metode studi lapangan dan kajian literatur, penelitian ini menemukan bahwa terdapat tiga indikator yang mempengaruhi Indonesia untuk menerapkan kebijakan desekuritisasi terhadap pengungsi yakni; status Indonesia sebagai negara transit; pengaruh internal seperti aspek sosial dan ekonomi; dan pengaruh eksternal yang mendorong Indonesia untuk menerapkan kebijakan pro-pengungsi.

Kata-kata Kunci: Indonesia, Pengungsi, Desekuritisasi